

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN INTERN PERMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)**

ARTIKEL



Oleh:

**YOSI JUITA
NIM: 57716 / 2010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)

Oleh:

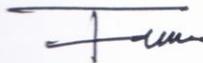
YOSI JUITA
2010/57716

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2014

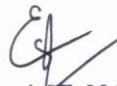
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP: 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP: 19781204 200801 2 011

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
INTERN PERMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN**
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi)

YOSI JUITA

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar
email: yosijuita@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan pengaruh pengawasan intern pemerintah daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Penelitian ini berjenis deskriptif kausatif yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y). Populasi penelitian ini terdiri dari instansi pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi sebanyak 87 orang, sehingga sampel penelitian ini adalah *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ternyata terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai t sebesar 2,069 dan tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05), 2) ternyata terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan nilai t sebesar 3,184 dan tingkat signifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05). Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Intern Permerintah Daerah dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of government accounting standards on the quality of financial reporting information and influence internal control pemerintah area to quality financial reporting information Unit (SKPD) Bukittinggi.

This study was descriptive causative describe the facts that happened clearly and see the effect of each variable causes (X) to the result variable (Y). The study population consisted of instansi government civil servants (PNS) parts and accounting staff work units (SKPD) Bukittinggi as many as 87 people, so this sample is due to the total sampling population of less than 100 objects.

The results of this study indicate that 1) it turns out the presence of a positive and significant effect of the application of accounting standards on the quality of financial reporting information to the t value of 2.069 and 0.042 significance level value is less than the significant level α 5% (0.05), 2) proved the presence of presence of a positive and significant effect between Local Government Internal Audit of the quality of financial reporting information to the t value of 3.184 and 0.004 singnifikan level value is less than the significant level α 5% (0.05). This research is expected to contribute positively to the Unit (SKPD) Bukittinggi.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control and Quality Information pemerintah Regions Financial Statements

A. Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tujuan yang dicapai pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Keuangan negara atau daerah menurut Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Pertanggungjawaban tersebut tentunya tergambarkan pada informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diterbitkan secara periodik pada suatu pemerintahan.

Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang berlaku. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan

bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Tentunya laporan keuangan yang disajikan memerlukan pengawasan dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah agar bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. Menurut Mardiasmo (2006:1) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Artinya SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang memberikan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengawasan intern pemerintah merupakan aktivitas pengungkapan dan penilaian yang dilaksanakan di dalam entitas untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan

Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIPD) yang menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan intern pemerintah membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance processes*) (Kuntadi, 2009:15).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada instansi dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka sebagai pengguna anggaran diharuskan menyenggarakan pencatatan akuntansi. Pencatatan atas transaksi akuntansi tersebut berfungsi untuk menyiapkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP dan mampu menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2009 Kota Bukittinggi, BPK RI perwakilan

Sumatera Barat memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada Tahun 2010 opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Bukittinggi tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tahun 2011 juga masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan intern pemerintahan (SPI) Kota Bukittinggi (www.bpkri.go.id)

Pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKPD kota Bukittinggi disebabkan oleh kesalahan yang ditemukan TIM BPK sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu 1) masih adanya perjalanan fiktif, dimana adanya perbedaan antara kenyataan yang dilakukan dengan laporan yang telah disajikan, 2) Kesalahan penganggaran belanja, 3) kesalahan inventaris atau revaluasi aset terutama tidak termasuk kelompok aset tetap, pengelolaan dan penatausahaan persediaan, 4) Kesalahan penggunaan langsung anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah. Semua permasalahan ini tentunya dapat dilihat pada informasi laporan keuangan yang disajikan pada masing-masing SKPD. Hal ini tentunya juga memperlihatkan lemahnya Pengawasan Intern Daerah. (Koran Haluan media group Sumbar-Riau-Kepri (edisi 502 Tahun XIII, Jum'at 24 Juni 2011).

Penerapan Standar Akuntansi pemerintah SKPD Kota Bukittinggi dan Pengawasan Intern Daerah belum optimal dilaksanakan, karena kedua variabel ini memiliki hubungan yang sangat penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Apabila laporan keuangan tidak dapat

memberikan informasi yang relevan, andal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia, berarti menunjukkan lemahnya pengawasan intern daerah. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangatlah penting, kurang optimalnya kinerja pemerintahan kota Bukittinggi, akan memberikan citra yang tidak baik dihadapan masyarakat, maka diperlukan peran pimpinan dan pegawai masing-masing SKPD dalam mengwujudkan pemerintahan yang bersih.

Penjelasan diatas, sebelumnya juga telah membuktikan secara empirik telah dibuktikan oleh Kusumah (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Penelitian Hindriani (2012) juga memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kesehatan terbatas pada internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di organisasi, melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal. Perbedaan penelitian ini berada pada variabel penelitian dan objek dari penelitian. Variabel independen yang akan diteliti adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Intern Permerintahan Daerah, sedangkan variabel dependennya yaitu Kualitas Informasi

Laporan Keuangan. Objek penelitian ini terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.

Uraian di atas membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang: **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengawasan Intern Permerintahan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi.**

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kausatif. Menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif “merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, menghubungkan dengan variabel yang lain”. Penelitian kausatif menurut Sugiyono (2005:12) yaitu “penelitian yang menyatakan hubungan sebab akibat”. Jadi, dalam penelitian ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara jelas dan melihat pengaruh dari masing-masing variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y).

Populasi Menurut Sukmadinata (2008:250) menyebutkan bahwa orang-orang, lembaga, organisasi, benda-benda yang menjadi sasaran penelitian, maka penelitian ini terdiri dari orang-orang yang berada di sebuah instansi pemerintahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian dan staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi

berjumlah 29 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat dengan jumlah pegawai kepala bagian dan staf akuntansi sebanyak 87 orang.

Menurut Arikunto (2006) mengemukakan di dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, dan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% – 15% atau 20% – 25% atau lebih. Penelitian ini menggunakan *totalsampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 orang.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: a) data primer adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari objek penelitian perorangan dengan memberikan angket penelitian pada para responden untuk diisi sesuai pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Angket tersebut dikembalikan kepada peneliti untuk disusun, diolah dan diinterprestasikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan b) data sekunder data yang sudah jadi (tersedia) dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yang menjelaskan gambaran umum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa informasi jumlah SKPD dan pegawai, dimana peneliti dapat memperoleh data tersebut melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bukittinggi yang telah diolah, dan disajikan sebelumnya oleh masing-masing SKPD yang memuat tentang gambaran umum dari organisasi yang diteliti dalam penelitian ini.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sumber data diperoleh dari: a) Studi Lapangan diambil dari data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan, guna memperoleh data dari bagian-bagian yang sesuai dengan objek penelitian, dan daftar pertanyaan ini akan diedarkan kepada responden untuk memperoleh jawabannya, b) Studi Perpustakaan digunakan untuk dalam pengumpulan data ini peneliti mempelajari buku-buku literatur, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat berupa 1) observasi (Pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap responden melalui pertanyaan angket yang telah disusun sebelumnya, 2) penyebaran angket atau kuesioner yaitu dengan memberikannya kepada responden, dimana responden penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bukittinggi kepala bagian dan staf akuntansi dengan tujuan agar pegawai dapat mengisi formulir isian secara objektif yang telah disediakan.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dari analisa data yaitu Analisa deskriptif, Regresi linear berganda (Koefisien Determinasi (R^2), Uji F dan Uji Hipotesis (uji t).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, dan Inspektorat. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek.

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan tidak ada satu pun SKPD yang menolak menerima angket, sehingga sampel yang direncanakan 87 SKPD semuanya mengisi dengan lengkap. Hingga batas akhir pengumpulan data, angket yang diterima kembali sebanyak 87 angket. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan angket adalah tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014.

2. Hasil Penelitian

Uji t statistik (t-test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap terikatnya. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis setiap variabel dapat menggunakan Uji t, untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berdasarkan tabel uji t dapat dilihat pengujian pada masing-masing sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Pengujian hipotesis 1 (H1) menjelaskan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi (beta) adalah 0,211. dengan nilai t sebesar 2,069 dan tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha 5\%$ (0,05), maka H_0 ditolak berarti tingkat kesalahan yang bisa ditolerir, maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Pengujian hipotesis 2 (H2) menjelaskan bahwa variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah memiliki nilai koefisien regresi (beta) adalah 0,614 dengan nilai t sebesar 3,184 dan tingkat signifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha 5\%$ (0,05) maka H_0 ditolak berarti tingkat kesalahan yang bisa ditolerir, maka PIP Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa dari variabel bebas tersebut (penerapan SAP dan PIP Daerah) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kualitas informasi laporan keuangan secara parsial adalah

variabel Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan nilai 0,614.

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengolahan data dengan program SPSS 20 dapat diketahui bahwa:

a. Pengaruh penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Hasil ini didukung oleh penelitian Santoso (2008) yang mengemukakan hasil bahwa secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu perlu pengkajian atas pelaksanaan praktis dari Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada akuntansi pemerintah, karena sudah diterapkannya pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia yang sesuai dengan SAP. Standar

tersebut sudah dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada 13 Juni 2005. Hal tersebut merupakan jawaban pemerintah atas tuntutan akan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan agar tujuan akuntansi pemerintah dapat diaplikasikan dengan baik. Adapun tujuan akuntansi pemerintah menurut Nordiawan (2006:7) adalah 1) Tujuan pertanggungjawaban, 2) Tujuan manajerial, 3) Tujuan pengawasan.

b. Pengaruh PIP Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Kota Bukittinggi

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuannya adalah mewujudkan *good governance* dan *clean government*, dimana pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta

bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Penjelasan tersebut juga didukung oleh pendapat Cahyat (2004) bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.

Pengawasan intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penjelasan tentang ini diperkuat oleh pendapat Mulyadi (2001:163) yang mengatakan bahwa Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan perumusan, maka ditemukan hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa:

1. Kesimpulan

Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Dengan demikian hipotesa pertama yang menyatakan

adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan dapat diterima dengan nilai t sebesar 2,069 atau tingkat signifikansi 0,042 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05).

Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Dengan demikian hipotesa kedua diterima, yang menyatakan adanya pengaruh pengawasan Intern Pemerintah Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dapat diterima dengan nilai t sebesar 3,184 atau tingkat signifikan 0,004 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan α 5% (0,05)

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disimpulkan, maka peneliti menyarankan kepada:

Hendaknya pegawai yang memiliki tanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dapat memberikan informasi sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena hal tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kota Bukittinggi.

Hendaknya Pengawasan Intern Daerah SKPD Kota Bukittinggi melaksanakan tugas dan fungsinya dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana disusun sebelumnya, agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berkualitas kepada

pemakai laporan keuangan. Hal ini telah dibuktikan secara empiris bahwa terdapatnya pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Intern Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD Kota Bukittinggi.

Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai kualitas informasi laporan keuangan. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memotivasi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Cahyat, A. (2004). *Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah*. Volume 2 No. 2, November.

Kuntadi (2009), *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Santoso. (2008) yang berjudul tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud urip santoso@home.unpar.ac.id

Sugiyono (2005). *Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for Windows*, Alfabeta, Bandung.

Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan* (Edisi III). Yogyakarta: BPF

Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

www.bpkri.go.id

Reliability Statistics X1

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,841	0,848	15

Reliability Statistics X2

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,83	0,832	15

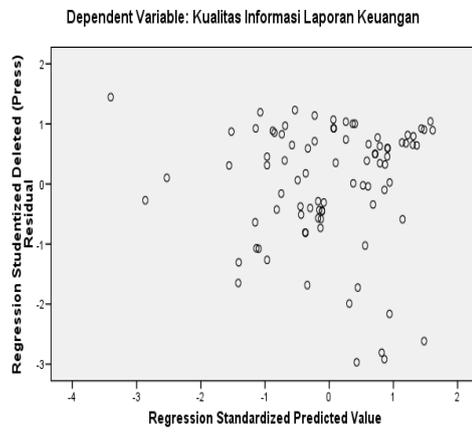
Reliability Statistics Y

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,875	0,878	15

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,620(a)	,449	,226	7,12887

Scatterplot



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	50,515	7,537		6,703	,000
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,211	,102	,220	2,069	,042
	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	,614	,277	,320	3,184	,004

a Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,620(a)	,449	,226	7,12887

a Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

b Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218,044	2	109,022	4,145	,001(a)
	Residual	4268,945	84	50,821		
	Total	4486,989	86			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

